

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH, TERHADAP BELANJA MODAL

Junaedy

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah baik secara Parsial maupun Silmutan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Rumusan masalah penelitian adalah “Apakah DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah secara Parsial dan Simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua?”

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, seraca Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Kata Kunci : *Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, Belanja Modal.*

PENDAHULUAN

Surplus APBD terus terjadi pada Pemprov dan Pemkab/kota, yang merupakan sumber pendanaan baru. Selama 2004-2007, terjadi surplus anggaran di tingkat Pemprov dan Pemkab/kota di Papua sebesar 5-10% per tahunnya. Surplus ini sebagian besar digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada perusahaan daerah. Secara akumulasi, surplus anggaran Pemprov dan seluruh Pemkab/kota

ini diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 7 triliun.

Pendanaan yang bersumber dari DAU masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional khususnya kabupaten/kota dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. DAU Provinsi Papua pada tahun 2006 sebesar 810 Miliar Rupiah. Total DAU untuk seluruh Provinsi Papua, termasuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua mencapai 7,2 Triliun Rupiah.

Syukri dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD Adi, (2006), Harianto dan Adi, (2007). Sepanjang 2014, tak kurang dari Rp 341,21 triliun dana dari pemerintah pusat akan dibagi-bagikan ke sejumlah Provinsi dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun ini, Papua mendapatkan jatah terbesar tingkat provinsi sebesar Rp 1,99 triliun. Dana perimbangan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), memberikan kontribusi cukup besar bagi pendanaan pembangunan di kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan (Handayani, 2011). Dari APBD 2004-2008 terlihat pendapatan daerah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. PAD yang besar di suatu daerah akan membuat prioritas pembangunan di daerah tersebut semakin meningkat (Mahmudi, 2010). Dengan kondisi pendapatan daerah Provinsi Papua yang sangat besar, komposisi belanja yang dilakukan menunjukkan bahwa komposisi terbesar (56 persen) belanja Provinsi dihabiskan untuk sektor administrasi umum pemerintahan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan. Artinya pendapatan yang besar tadi sebagian besar dibelanjakan untuk menunjang administrasi daerah. Kemudian porsi belanja modal, mencakup obat-obatan, alat kesehatan, alat kontrasepsi, dll, sangat sedikit dibandingkan belanja pengadaan barang-barang tersebut. Kecenderungan yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota dan di sektor strategis lain. Dengan pendapat Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Pendapatan yang sangat besar tadi tidak mampu menggerakkan perekonomian Provinsi Papua. Hal itu karena sebagian besar dari pendapatan tidak berputar di Papua, misalnya belanja modal untuk pembelian komputer atau perangkat keras, mesin dan lain-lain yang dilakukan di luar Papua. Pendapatan

provinsi dan kabupaten/kota banyak tersedot ke luar sehingga roda perekonomian lokal kurang bergairah.

SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Hidayat, 2013) menyatakan bahwa SiLPA adalah pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan Daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apa lagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Lulung, 2009), SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal, Liliana, (2011) menyatakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Kadi, 2010). Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD

hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang - Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah. Provinsi Papua yang mempunyai daerah dengan wilayah yang lebih luas kabupaten/kota seperti Kab, Merauke luas wilayah 430240,95 km² , Kab Yalimo luas wilayah 36739,30 km², Kab Mimika 22903,78 km², Kab Boven Digoel 27880,73 km² dan lain-lain tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak dalam sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Kholifah (2013) menyatakan sumber pendanaan dengan daerah yang lebih luas dan daerah pemekaran membutuhkan dana yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PPNo. 55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu :

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- b. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- d. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam

APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar AD berupa jumlah gaji PNS. Formula DAU tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal ($KbF - KpF$). Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Dan sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan akan fiskalnya tinggi, sudah dipastikan Dana

Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

PAD dipungut/diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundang undangan Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa :

a. PAD bersumber dari :

- 1). Pajak Daerah
- 2). Retribusi Daerah
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
- 4). Lain-lain PAD yang sah.

b. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- 1). Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber

lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD menjadi empat jenis pendapatan sebagai berikut:

a). Pajak Daerah terdiri dari :

Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak air bawah tanah, Pajak sarang walet, Pajak lingkungan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

b). Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.

c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian laba bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.

d). Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan, antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas bantuan kerugian daerah, penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Kuncoro (2004) Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan

pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam yaitu :

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1). 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi
- 2). 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota
- 3). 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah dari penerimaan PBB sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a). 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada

seluruh daerah kabupaten dan kota

- b). 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan.

Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yaitu :

- a. Kegiatan Lanjutan. Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum habis dengan terlebih dahulu menetapkan DPA-L (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan) pada akhir tahun sebelumnya.
- b. Kegiatan Baru. Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu).

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Litbang, 2008).

Luas Wilayah

Luas wilayah merupakan sala satu mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasana daerah sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat

kaitannya dengan penganggaran belanja modal.

Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti:

- a. Rumah Sakit/Puskesmas
- b. Gedung Sekolah
- c. Pembuatan tower telekomunikasi,
- d. Pembangunan pasar-pasar tempat berdagang,
- e. Pembukaanjalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya.

Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan. Penyediaan prasarana berdasarkan wilayah ini tidak lepas juga kaitannya dengan penyebaran penduduk di wilayah tersebut. Dimana ada penduduk maka disana terjadi kegiatan ekonomi. Efisiensi pembangunan wilayah untuk menunjang alokasi sumber daya secara efektif diberbagai wilayah. Keadilan artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu wilayah – wilayah yang kurang maju. Karena penduduk mempunyai mobilitas, maka upaya terbaik adalah membantu penduduk yang kurang makmur yang tinggal di suatu wilayah tertentu agar berani pindah ke wilayah lain (Adisasmita, 2005).

Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagai ke dalam 6 bagian, yaitu :

- a). Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya
- b). Belanja aset tetap lainnya

- c). Belanja aset lainnya
 - d). Belanja Tanah
 - e). Belanja Mesin
 - f). Belanja Gedung dan Bangunan.
- Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang

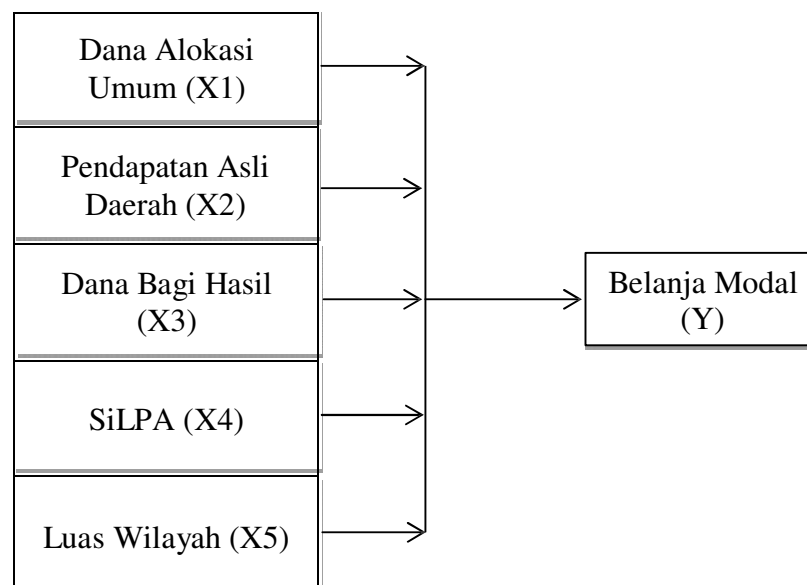
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- 1). Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- 2). Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.
- 3). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kerangka Konseptual

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Ha1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha4 : Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha5 : Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji yang mempunyai karakteristik tertentu, dalam statistik tidak terbatas yang mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian suatu kajian. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi yang diperoleh dengan cara tertentu. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi Umum untuk daerah dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$DAU = \text{Cela Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD

dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus :

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dana Bagi Hasil

bagian Pemerintah Pusat sebesar 84,5%.

Dana Bagi Hasil Pajak bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari hasil-hasil Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi. Dalam bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 15,5% setelah dikurangkan komponen pajak dan pungutan lainnya serta

Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus menjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel SiLPA ini adalah sebagai berikut (Hidayat, 2013):

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Belanja}}$$

Luas Wilayah
Bersasaran organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah

dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Demikian juga

mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah. Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan Luas wilayah yang merupakan daerah pemekaran dengan luas kabupaten/kota yang memiliki masing – masing daerah yang berbeda – beda.

Variabel Dependen Belanja Modal

Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan

pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Variabel belanja modal dapat diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara DAU, PAD, Dana Bagi Hasil, SiLPA, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan dengan Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 PAD + \beta_3 DBH + \beta_4 SiLPA + \beta_5 LUAS + e$$

Keterangan :

α	=	
konstanta		
β_i	=	
intersep/slope/koeffisien regresi		
BM	=	Belanja Modal
DAU	=	Dana Alokasi Umum

PAD	=	
Pendapatan Asli Daerah		
DBH	=	Dana Bagi Hasil
SiLPA	=	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
LUAS	=	Luas Wilayah
e	=	error tern

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel – variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Pengujian hipotesi akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=0,05$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut

umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmusosial dan dianggap cukup

tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	55	33,070	744,492	400,42342	134,101782
PAD	55	4,506	344,615	37,08105	65,357883
DBH	55	11,048	729,143	95,12062	160,846574
SiLPA	55	3,203	312,055	85,20451	74,693563
Luaswilayah	55	10,704	786,180	86,37991	223,386534
Belanjamodal	55	1,681	389,678	168,53318	108,760981
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 21.0

Keterangan : dalam jutaan Rupiah, kecuali Luas dalam Km².

Regresi Linear Berganda

Setelah semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pemodelan atas koefisein regresi yang diperoleh. Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan Antara

variabel dependent (terikat) dengan variabel independent (bebas), dengan jumlah variabel independent lebih dari satu maka dapat diuji sebagai berikut.

Tabel 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-33,894	36,537		-,928	,358
1 DAU	,402	,085	,495	4,739	,000
PAD	-,089	,196	-,054	-,454	,652
DBH	,375	,083	,555	4,527	,000
SiLPA	,119	,165	,082	,718	,476
Luaswilayah	-,010	,049	-,020	-,202	,841

a. Dependent Variable: belanjamodal

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = -33,894 + 0,402DAU - 0,089PAD + 0,375DBH + 0,119SiLPA - 0,010LUAS + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar -33,894 artinya apabila variabel DAU, PAD, DBH, SiLPA dan LUAS bernilai 0, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 meningkat sebesar Rp -33,894 juta.
- b. Nilai regresi variabel DAU adalah 0,402. Nilai DAU yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU, artinya jika DAU mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 402 juta dengan satuan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.
- c. Nilai koefisien variabel PAD adalah -0,089. Nilai PAD yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan PAD, artinya jika PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka akan menurunkan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 89 juta dengan satuan asumsi variabel lain dalam kondisi tidak konstan.

- d. Nilai koefisien variabel DBH adalah 0,375. Nilai DBH positif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Dana Bagi Hasil, artinya Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 375 juta dengan satuan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
- e. Nilai koefisien variabel SiLPA adalah 0,119. Nilai SiLPA positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan SiLPA, artinya jika SiLPA mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 119 juta dengan satuan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
- f. Nilai koefisien variabel LUAS adalah -0,010. Nilai LUAS negatif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas Wilayah, artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 Km² maka akan terjadi penurunan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2009 - 2013 sebesar Rp 10 juta dengan satuan asumsi variabel lain dalam kondisi tidak konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan

pengaruh variabel – variabel bebas yaitu DAU, PAD, DBH, SiLPA, dan

Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,724 ^a	,524	,475	78,788957	1,520

a. Predictors: (Constant), luaswilayah, DBH, DAU, SiLPA, PAD

b. Dependent Variable: belanjamodal

Tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal sebesar 0,724. Artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat antara DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal sebesar 724, dan koefisien determinasi adjusted R² sebesar 0,475. Angka-angka ini berarti DAU, PAD, DBH,

SiLPA dan Luas Wilayah memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 475. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel DAU, PAD, DBH, SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Nilai R² = 1 yang lebih dari satu maka berarti terdapat suatu hubungan yang sempurna

b. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-33,894	36,537		-,928	,358
1 DAU	,402	,085	,495	4,739	,000
PAD	-,089	,196	-,054	-,454	,652
DBH	,375	,083	,555	4,527	,000
SiLPA	,119	,165	,082	,718	,476
Luaswilayah	-,010	,049	-,020	-,202	,841

a. Dependent Variable: belanjamodal

Dari tabel diatas menunjukan bahwa kemampuan masing –

masing variabel independen secara individual memiliki

tingkat signifikan yang berbeda – beda. Pada variabel DAU memiliki t hitung sebesar 0,000 dan nilai signifikan kurang dari 0,05 hal ini berarti variabel secara Parsial DAU dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 0,652 dan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel DBH memiliki t hitung sebesar 0,000 dan nilai signifikan kurang

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kemudian variabel SiLPA dengan t hitung sebesar 0,479 dan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dan Luas wilayah memiliki t hitung 0,841 dengan tingkat signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

c. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	334586,074	5	66917,215	10,780	,000 ^b
	Residual	304177,284	49	6207,700		
	Total	638763,358	54			

a. Dependent Variable: belanjamodal

b. Predictors: (Constant), luaswilayah, DBH, DAU, SiLPA, PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dari hasil pengujian ini H_A diterima dan H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua tahun 2009 – 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Variabel independen DAU memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi β (0,402). Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_A diterima yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Papua.

2. Variabel independen PAD memiliki nilai signifikansi $0,652 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi $\beta (0,089)$. maka dari hasil pengujian Ha2 ditolak yang menunjukkan bahwa hal ini PAD tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Secara Parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Variabel independen Dana Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi $\beta(0,375)$.Maka dari hasil pengujian Ha3 di terima yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Ini berarti semakin besar Dana Bagi Hasil maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,476 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi $\beta (0,119)$. maka dari hasil pengujian Ha4 ditolak yang menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja

Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak dapat memenuhi perekonomian dan kebutuhan fasilitas daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

5. Pengujian hipotesis kelima (Ha5), variabel independen Luas Wilayah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,841 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi $\beta (0,-010)$. maka dari hasil pengujian Ha5 di tolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Papua.
6. Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, pengujian secara Simultan, menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dari hasil pengujian ini penelitian ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan variabel yang paling dominan di gunakan dalam anggaran pemerintahan dengan melihat nilai signifikannya $0,000$ dan koefisien regresi $\beta (0,402)$ yang mempengaruhi belanja modal di

kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun anggaran 2009-2013. Dana Bagi Hasil juga merupakan variabel yang dominan digunakan dalam anggaran pemerintahan melihat nilai signifikannya 0,000 dan koefisien regresinya β (0,375) yang mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun anggaran 2009-2013. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam pemerintahan digunakan sebagai pembiayaan belanja modal dan kebutuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Saran

1. Saran yang dapat di rekomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor – sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data Laporan Realisasi APBD yang lebih lengkap dan temuan dalam

penelitian ini belum dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

4. Data penelitian ini hanya menggunakan pada Laporan Realisasi APBD dalam format SAP saja pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pada Pemerintah Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006- 2008. Jakarta. Indonesia.
- Bastian, Indra, (2006) Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga.
- Bayu, (2012). Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. Universitas Gajah Mada
- Rauta dan Kameo, (2003). Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti..
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,(2011). Pelengkap buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2011 (peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi). Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Erlis, (2010) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan SiLPA Terhadap

- Belanja Modal dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera).
- Frelistiyani, (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa.
- Gujarati, Damodar N, dan Porter, Dawn C, 2009. Dasar-dasar Ekonometrika (*basic econometrics*, 5th ed.) (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, dan Carlos Mangungsong, penerjemah). Salemba Empat : Jakarta.
- Ghozali (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Vol. IV). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdulah, (2007) Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Selamba Empat.
- Harianto, David dan Adi Priyo Hadi, 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Harmantyo, Djoko, (2007). Pemekaran daerah dan konflik keruangan, kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia. Makara, Sains, 11, 16-22.
- Joko. (2007). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Parallel Session IA: Fiscal Decentralization.
- Kementerian Dalam Negeri, (2010). Kode dan data wilayah provinsi, kab/kota 2010. Diakses melalui laman simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil Pembangunan Provinsi 9400 Papua 2013.pdf pada tanggal 23 Oktober 2014
- Kementerian Keuangan (2013). Deskripsi Dan Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2013. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kholifah, (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Dan Luas Wilayah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.
- Kusnandar dan Siswanto, (2012) pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) melalui situs Web resmi yang beralamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangandaerah/setelah-ta-2006> pada tanggal 27 Oktober.
- Mahmudi,(2011). Akuntansi sektor publik. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo,(2002). Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta.
- Maesaroh dan Moerti, Wisnoe. 2011. Sisa anggaran untuk

- infrastruktur. Seputar Indonesia. 26 Januari 2012.
- Mangkoesoebroto, Guritno, (2001) Ekonomi Publik, Edisi 3. Yogyakarta : BPFE
- Maryadi (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Nordiawan, (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan Negara atas beban sisa lebih perhitungan anggaran.
- Putro, (2011) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).
- Ross, Stephen A, Westerfield, Randolph W. dan Jordan, Bradford D, 2009. Pengantar keuangan perusahaan (*corporate finance fundamentals, 8th ed.*) (Ali Akbar Yulianto, Rafika Yuniasih, Christine, Penerjemah). Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Puji. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Universitas Siliwangi.
- Stungkir, Anggiat (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Juli. Medan
- Sugiarthi dan Supadmi, (2010) Meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasipada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Syukriy, Abdullah dan Abdul Halim, 2006. Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Solikin, (2007). Hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan belanja modal di jawa barat 27 Januari 2012. http://file.upi.edu/Direktori/FP/EB/Prodi.Akuntansi/196510122001121-Ikin_Solikin/Jurnal_Pad.Pdf>
- Walidi, (2009). Pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita, belanja

modal sebagai variabel
intervening (studi kasus di
provinsi sumatera

utara).Tesis.<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4069/1/09E01381.pdf>